

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah

PT.Perkebunan Nusantara XIII (Persero) disingkat PTPN XIII adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan pada tgl. 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 1996 dan akte notaris Harun Kamil, SH No.46 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I melalui keputusan No. C2-8341.IIT.01.01.TII.96 tahun 1996 serta tambahan berita negara RI No. 81. Pada awal operasinya (Maret s/d Juli 1996), Kantor Direksi PTPN XIII menempati Kantor Eks. LO PTP 7. Karena gedung tersebut akan direhab maka Kantor Direksi berpindah sementara waktu ke Kantor PT. POS Indonesia selama tahun 1996 s/d 1998. Kemudian setelah pembangunan gedung Kantor Direksi yang baru selesai, maka hingga saat ini Kantor Direksi PTPN XIII pindah ke Jalan Sultan Abdurrachman No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat. PTPN XIII merupakan penggabungan dari Proyek Pengembangan 8 (delapan) Eks PTP yaitu PTP VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXIV-V, XXVI DAN XXIX yang semuanya berlokasi di Kalimantan.

PTPN XIII bergerak pada bidang usaha agroindustri. Komoditas utama yang dikelola PTPN XIII yaitu Kelapa Sawit dan Karet. Arah pengembangan Kelapa Sawit dilakukan melalui usaha horisontal dan vertikal. Pengembangan horisontal melalui perluasan areal terutama Kebun Plasma mengingat luas

wilayah Kalimantan dengan iklim tropis sepanjang tahun masih terbuka untuk memperluas areal perkebunan. Sedang pengembangan yang bersifat vertikal merupakan strategi membangun *Down Stream Industry*, di mana di dalamnya terdapat Industri Fraksinasi, *Refinery*, Oleo Kimia, dan Industri Pemanfaatan Sisa Olahan.

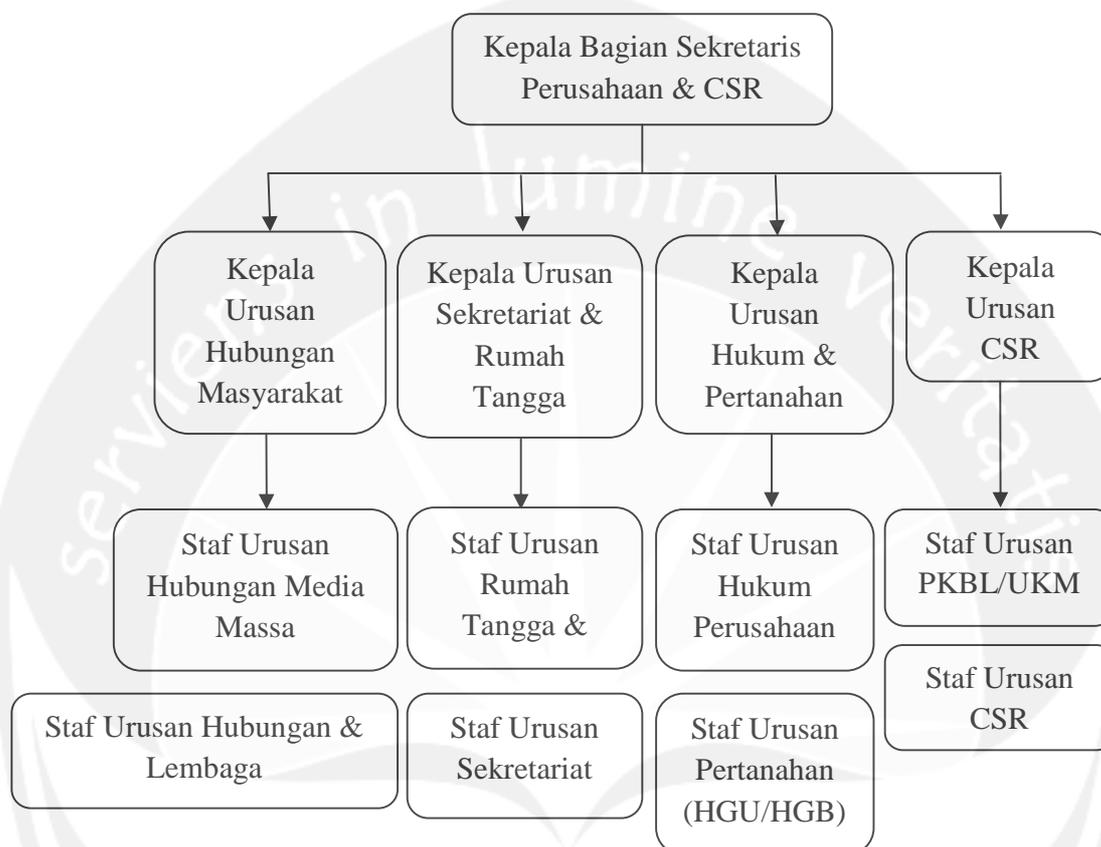
Dari sisi manajemen, dalam upaya mewujudkan visinya PTPN XIII melakukan Program Transformasi Bisnis (PTB) yang dicanangkan sejak Mei 2001. Salah satu produk dari PTB adalah manajemen telah menetapkan *Strategic Initiatives* (SI) yang merupakan terobosan fundamental dalam upaya meningkatkan pola kerja konvensional (*Business as Usual*) menjadi perusahaan berbasis ilmu pengetahuan standar kelas dunia. Dalam proses Transformasi Bisnis, *Strategic Initiatives* menjadi penting karena menjadi pijakan untuk melakukan lompatan bisnis dalam keseluruhan operasional perusahaan. PTPN XIII berkantor pusat di Pontianak, Kalimantan Barat, sampai dengan akhir tahun ini mempekerjakan karyawan tetap dan honorer sebanyak 13 ribuan orang.

B. Strukur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (Persero)



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT PERUSAHAAN & CSR



Dalam kepengurusannya, PTPN XIII sebagai BUMN besar di Kalimantan Barat tentunya memiliki susunan kepengurusan yang terstruktur yang disebut juga dengan struktur organisasi. Struktur ini dibuat dengan pertimbangan dari pihak – pihak berkepentingan perusahaan berdasarkan fungsi dan kedudukan masing – masing dari bidang yang ada. Hal ini juga untuk mempermudah kegiatan birokrasi di PTPN XIII.

Untuk aktifitas kehumasan dan CSR sendiri ditempatkan di dua bagian yang berbeda. Hal ini dikarenakan pertimbangan CSR sebagai bagian andalan dari PTPN

XIII untuk mempertahankan eksistensi perusahaan terlebih di tengah isu yang berkembang sehingga perusahaan menilai harus membuat bagian tersendiri bagi CSR agar lebih fokus dalam bekerja. Meskipun memang dalam kenyataannya, CSR sendiri merupakan bagian dari kegiatan *public relations*. Sedangkan untuk aktifitas kehumasan/*public relations* khusus ditugaskan untuk menangani hubungan internal maupun eksternal perusahaan yang tentunya di luar dari aktifitas CSR. Namun seringkali pula dalam aktifitas perusahaan, bagian CSR dan bagian humas perusahaan bekerja bersamaan. Misalnya dalam aktifitas penghijauan yang merupakan agenda CSR PTPN XIII, pihak humas bertugas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan tersebut. Meskipun ditempatkan pada bagian yang berbeda, kedua bidang ini berada di bawah Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan & CSR.

C. Lingkup Kerja Lembaga

1. Arah Kebijakan

Visi :

- a) Menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara berkelanjutan.

Misi :

- a) Menghasilkan produk dan jasa dalam bidang kelapa sawit, karet, industri hilir dan bidang usaha lainnya secara efisien dan bermutu tinggi.
- b) Mendinamisasikan perekonomian regional dan nasional.
- c) Mengembangkan dan memberdayakan potensi masyarakat berbasis kemitraan.
- d) Mengembangkan sistem perkebunan yang ramah lingkungan

2. Tata Nilai

- a. Integritas (*Integrity*)
- b. Disiplin (*Discipline*)
- c. Perbaikan Terus Menerus (*Continual Improvement*)
- d. Bertindak Segera (*Prompt Action*)
- e. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
- f. Inovasi (*Innovation*)
- g. Komunikasi (*Communication*)
- h. Kerukunan (*Harmony*)

3. Tiga Kebijakan Strategis

a. Asset and Resources Optimalization

1. Kebun (*Soil Building* Dengan Tankos, Limbah Cair) Dan Pemupukan Majemuk Pola 4T.

2. Pabrik (Perbaikan Menyeluruh 7 Unit PMS & 1 Unit CRF).
3. Infrastruktur (Perbaikan Dan Peningkatan Jalan, Jembatan Dan Alat-Alat Berat).
4. Bangunan Kantor dan Perumahan.
5. Pembinaan SDM (*Character Building*)

b. Business Process

1. Pembentukan Distrik Menjadi SBU (*Profit Centre*).
2. Reorganisasi Kantor Direksi (*Centralized Of Control*).
3. Pengelolaan Plasma Dengan Pola Manajemen Satu Atap (Pola Kemitraan).
4. Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Perusahaan.

c. Progressive Business Development

1. Pemenuhan Usaha Skala Ekonomi.
2. Penambahan Kebun Dan Pabrik Bagi Fasilitas Dan Sistem.
3. Pengembangan Di-Daerah Baru Dengan Pola Kemitraan (Jvc).
4. Pengembangan Industri Hilir, Trading Dan Supporting.

D. Isu – Isu Lingkungan Hidup yang Dialami Oleh Perusahaan Sawit di

Kalimantan Barat

Isu mengenai pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan sawit di Kalimantan Barat , juga dialami oleh PTPN XIII sebagai perusahaan yang memang memiliki komoditi utama kelapa sawit dan karet. Hal tersebut terjadi di luar kendali PTPN XIII, berita – berita mengenai hal tersebut dikonsumsi oleh masyarakat melalui media massa dan juga melalui apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat terjadi di lapangan, Masyarakat dapat dikatakan kecewa dengan sikap pemerintah dan pihak terkait yang kurang tegas, dan terkesan kurang peduli terhadap kepentingan masyarakat sekitar.

Isu ini terus hangat diperbincangkan dari masa ke masa dikarenakan semakin meningkatnya pemberitaan di media dan kemudahan mengakses berita serta dampak yang semakin dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentunya mendapat reaksi keras dari masyarakat, terlebih masyarakat yang merasakan dampak langsung dari berdirinya perusahaan sawit di Kalimantan Barat. Masyarakat melihat, mendengar dan merasakan sendiri bagaimana perusahaan sawit membuat hutan gundul untuk membuka lahan sawit baru sehingga merusak tempat tinggal orang utan, pemanasan global yang diakibatkan berkurangnya lahan hijau penghasil oksigen, degradasi dan konversi hutan, limbah kelapa sawit yang merusak lingkungan tempat tinggal penduduk sekitar daerah kebun, tercemarnya air – air dari hasil penebangan pada saat dihanyutkan ke hilir yang merusak

habitat ikan dan penghidupan nelayan, ditambah lagi terancamnya ketersediannya habitat keanekaragaman hayati.

Pemberitaan di harian Pos Kota dan AntaraNews. Com mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat berdirinya lahan sawit menjadi salah satu contoh pemberitaan yang menuai opini negatif dari masyarakat. Kedua media *online* tersebut, memiliki jangkauan luas dan dapat dibaca oleh masyarakat.

Opini dari masyarakat tersebut menunjukkan ketidakpuasan dari masyarakat atas kinerja dari perusahaan sawit dalam menangani masalah lingkungan hidup yang perusahaan mereka alami.

Citra korporat adalah citra keseluruhan yang dibangun dari semua komponen perusahaan, seperti kualitas produk, keberhasilan ekspor, kesehatan keuangan, perilaku karyawan, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, pengalaman menyenangkan atau menyedihkan tentang pelayanan perusahaan.

PTPN XIII juga mengharapkan citra yang baik dari publiknya. Publik kunci dari PTPN XIII adalah masyarakat. PTPN XIII yang merupakan salah satu BUMN yang dimiliki negara bertanggung jawab terhadap rakyat. Perkebunan sawit dan karet PTPN XIII tersebar di seluruh area di wilayah Kalimantan yang kemudian dibagi menjadi beberapa distrik. Isu tersebut membuat citra PTPN XIII menjadi buruk.

Berdasarkan data wawancara, PR PTPN XIII mengetahui hal tersebut melalui komentar – komentar pembaca di surat kabar maupun melalui pemberitaan

televisi lokal di Kalimantan Barat. Selain itu, staf PR PTPN XIII juga membuat kliping semua berita mengenai kasus tersebut untuk dijadikan patokan untuk mengetahui sejauh mana pemberitaan mengenai PTPN XIII. Bagi PTPN XIII selaku terbuka dengan kritik dan saran, karena perusahaan menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini.

PR PTPN XIII berangapan bahwa meningkatnya perkembangan isu ini tidak lepas dari peran media yang kurang berimbang dalam memberitakan kasus – kasus seputar perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sawit di Kalimantan Barat. Narasumber V mengatakan bahwa seringkali pemberitaan di media cenderung memihak kepada masyarakat tanpa melihat latar belakang sebenarnya tentang kejadian yang diberitakan. Seringkali pula pemberitaan kerap mengeneralisasikan semua perusahaan sawit di Kalimantan Barat sama, sehingga pembaca bisa salahartikan berita tersebut. Selain itu, media juga membuat berita – berita negatif tentang perusahaan sawit sebagai berita yang sangat besar dan penting, serta diberitakan terus menerus sedangkan berita yang baik hanya dimuat sekedarnya.

Pemberitaan yang kurang berimbang tersebut, sangat tidak menguntungkan PTPN XIII karena masyarakat menjadi tidak tahu permasalahan sesungguhnya yang terjadi. Pemberitaan tersebut membuat citra PTPN XIII buruk karena isu yang beredar tanpa dipastikan mengenai fakta di balik kasus yang terjadi sebenarnya karena masyarakat hanya membaca berita – berita yang tertulis di

media massa. Kurangnya informasi serta edukasi pula membuat masyarakat tidak mencari tahu lebih dulu dalang sebenarnya di balik semua kejadian yang mereka alami dan menyamaratakan semua perusahaan sawit.

Tudingan yang dilontarkan pada perkebunan kelapa sawit sering memutar balikkan fakta. *Greenpeace* misalnya, telah menekan Indonesia dengan mengkampanyehitamkan kelapa sawit Indonesia. *Greenpeace* menyatakan ekspansi perkebunan *kelapa sawit* dan *pulp* dan paper menyebabkan perusakan hutan alam dan lahan gambut Indonesia serta menyebabkan orang utan terancam punah. Sampai – sampai Nestle pun meresponnya dengan menghentikan penggunaan produk – produk yang (dikatakan *Greenpeace*) berasal dari perusakan hutan alam.

Tudingan *Greenpeace* itu terbantahkan, di mana S. Hidayatullah mengulas habis “Menguak Dusta Dusta *Greenpeace*” (2010). Di sana terungkap, ternyata pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia (dan negara – negara Asia) dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara – negara maju. Kekhawatiran itulah, kemudian negara – negara maju menggunakan *Greenpeace* untuk melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Dan persoalannya bukanlah kerusakan hutan, punahnya orang utan, atau pemanasan global, tapi pada sawitnya. Komoditas ini menjadi sasaran tembak mereka, dengan tujuan

agar pemerintah Indonesia menghentikan pengembangan sawit, sehingga tidak bisa bersaing di tingkat pasar global.

Selain itu, ada pula “gempuran” terhadap perusahaan sawit yang berasal dari opini negatif masyarakat yang tidak sengaja terbentuk. Hal tersebut muncul dari adanya “oknum” atau perusahaan yang belum memiliki komitmen tinggi terhadap program CSR. Sehingga dampaknya pun juga dirasakan oleh PTPN XIII, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Hal ini sangat berpengaruh pada eksistensi PTPN XIII, dan PTPN XIII berharap media massa juga dapat menjadi rekan dalam membantu PTPN XIII untuk mengelola isu melalui pemberitaan yang berimbang.

E. *Corporate Social Responsibility*: Kebijakan Pre-emptive Manajemen Isu

Bagi PTPN XIII, CSR dianggap sebagai investasi, agar organisasi dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan CSR adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk dikembangkan. Salah satu manfaat CSR adalah membangun citra dan reputasi organisasi yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis organisasi tersebut. Selain itu, program CSR yang dijalankan oleh PTPN XIII akan menghasilkan dukungan dari *stakeholder* ketika organisasi terkena isu ataupun krisis yang merugikan organisasi.

Kegiatan CSR PTPN XIII yang menjadi bagian dari kebijakan menyeluruh dan diimplementasikan sejak organisasi berdiri merupakan sebuah kebijakan *pre-*

emptive manajemen isu PTPN XIII. CSR yang baik dan dikembangkan berdasarkan pengharapan publik akan menciptakan harmonisasi hubungan organisasi dengan publik. Jika organisasi sudah menjalankan aktivitasnya berdasarkan apa yang sesuai dengan aturan dan pengharapan publik, maka harmonisasi hubungan akan tercipta dan pencapaian *objective* organisasi dapat diraih sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini kiranya menurut pihak PTPN XIII sejalan dengan pendekatan integrasi (*engagement approach*) manajemen isu. Yang penting dalam PTPN XIII, CSR harus dijalankan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, tidak hanya bersifat insidental dan semata demi meredam isu agar tidak muncul ke permukaan.

Dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang dituduhkan bagi perusahaan mereka, PTPN XIII telah memiliki program – program CSR tersendiri yang berkaitan dengan lingkungan sebagai wujud tindakan manajemen isu perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara, wujud program CSR PTPN XIII tersebut antara lain adalah:

a. Program AMDAL

Sebelum pembukaan lahan perkebunan maupun pembangunan pabrik, PTPN XIII berkomitmen untuk melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga proses pembukaan lahan maupun pembangunan pabrik, benar – benar sudah melalui proses studi mengenai

dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Hasil studi ini diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Studi AMDAL di proyek – proyek PTPN XIII tidak hanya sekedar naskah tebal atau *copy paste* dari studi AMDAL sebelumnya, namun setiap proyek yang dilakukan wajib melakukan studi AMDAL. Wajib di sini selain karena kepatuhan atas perundang – undangan yang berlaku, juga melihat manfaat dari AMDAL ini sangat luas sekali, yakni agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek pembangunan. Dan untuk menghindari dampak lingkungan yang tidak dapat ditoleransi maka disiapkan rancangan pengendalian dampak negatif yang akan terjadi.

Adanya studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Dokumen AMDAL merujuk pada aturan pemerintah terdiri atas lima rangkaian yang dilaksanakan secara berurutan, yaitu:

1. Konsultasi Masyarakat sebagai implementasi Kepka Bapedal No. 8/2000.
2. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (KA AMDAL).
3. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).

4. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).

5. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

b. Program Pengurangan Emisi

Sejak studi AMDAL dilakukan, sudah dirancang pengendalian pencemaran udara, termasuk pengurangan emisi. Tentu saja, di sini yang berperan adalah ketersediaan alat pencegah pencemaran udara, antara lain *scuber* dan cerobong asap. Pengendalian emisi gas buangan antara lain dengan pengelolaan emisi gas itu sendiri, termasuk pemantauan yang dilakukan secara teratur. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa gas emisi buangan di pabrik – pabrik harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dan ternyata dampak perkebunan kelapa sawit juga berpengaruh pada penyerapan CO₂. Ketika Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% sebelum tahun 2010, perkebunan kelapa sawit sudah memberikan sumbangan yang besar bagi penyerapan CO₂. Perkebunan kelapa sawit tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga mampu menyerap CO₂ sebanyak 251 ton per tahun. Sedangkan untuk perkebunan karet, mampu menyerap CO₂ mencapai 23 ton per tahun.

Menteri Pertanian, Suswono (2011) menyatakan bahwa pengembangan perkebunan dapat menggunakan lahan atau padang alang – alang yang sudah terbuka, dapat melakukan fisasi CO₂ menjadi O₂ serta

dalam pelaksanaan teknis mengikuti kaidah – kaidah konservasi. Dalam kaidah konservasi dengan tegas diatur penggunaan lahan yang dapat dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dan PTPN XIII selalu memperhatikan kaidah konservasi tersebut.

Pengurangan emisi juga dilakukan PTPN XIII dengan mengikuti perkembangan teknologi pengolahan kelapa sawit. Dalam perkembangan teknologi Pabrik Minyak Sawit (PMS), terus dilakukan inovasi yakni membangun pabrik yang ramah lingkungan. Untuk itu, PTPN XIII pun tertarik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut pada pembangunan PMS Kembayan (2010).

c. Program Pengolahan Limbah Cair menjadi Biodiesel

Dalam proses pengolahan, Pabrik Minyak Sawit (PMS) menghasilkan limbah cair yang masih mengandung sedikit *crude palm oil* (CPO). Limbah cair PMS terdiri dari air, kandungan minyak, serat, pasir, lumpur, dan sebagainya. Materi ini tidak beracun terhadap alam tetapi tidak dapat langsung dibuang ke dalam aliran sungai karena bersifat asam (pH sekitar 4) dan kadar BOD-nya sangat tinggi (mencapai 40.000 ppm).

Maka dari itu, wujud kepedulian terhadap lingkungan di setiap PMS PTPN XIII harus memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), yang berfungsi untuk mengolah air limbah, sehingga tidak mencemari lingkungan

dan memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Setiap ton Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah menghasilkan 0,65 ton air limbah.

PTPN XIII tidak “diam saja” dengan adanya IPAL, tapi kreativitas pekerja di PTPN XIII sangat tinggi. Hal ini diwujudkan dengan adanya inovasi produk berupa *biodiesel*, yang bahan bakunya diolah dari limbah cair yang masih terdapat kandungan minyak. Pemanfaatan limbah cair ini ternyata telah memberikan dampak yang sangat besar bagi pengelolaan lingkungan. Dengan adanya unit pengolahan *biodiesel*, berarti limbah cair bisa diminimalisir dan bernilai ekonomis.

Adanya *biodiesel* ini menunjukkan bahwa PTPN XIII juga peduli dengan pengembangan energi terbarukan. Saat ini, PTPN XIII sudah mempunyai dua unit pabrik pengolahan *biodiesel*, yakni di PMS Parindu, Kalimantan Barat dan PMS Samuntai, Kalimantan Timur, masing – masing berkapasitas 6.000 liter *biodiesel*/hari. Pabrik *biodiesel* tersebut sudah beroperasi sejak 2009 lalu hingga sekarang. Walaupun *biodiesel* hasil olahan PMS di lingkungan PTPN XIII hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, itu sudah menunjukkan efisiensi dan kepedulian terhadap energi terbarukan. Dalam penggunaannya pun dilakukan dengan sistem B20 untuk mesin/kendaraan yaitu 20% *biodiesel* dan 80% solar. Sedangkan untuk mesin tak bergerak atau statis seperti genset dan lainnya digunakan sistem B30 yaitu *biodiesel* 30% dan 70% solar.

Dengan menggunakan bahan bakar biodiesel ini, ke depan PTPN XIII dapat menghemat pembelian bahan bakar sebesar 30% dengan asumsi harga per liternya Rp 8.000 sedangkan bahan bakar biodiesel Rp 4.300 per liter. Itu semua sebagai wujud kepedulian PTPN XIII terhadap lingkungan, yang memanfaatkan limbah cair.

d. Program Manajemen Lingkungan

Ketaatan pada aturan tentang lingkungan ini juga terlihat dari aspek manajemen lahan yang dikembangkan oleh PTPN XIII. Dalam penataan lahan tersebut, PTPN XIII memanfaatkan lahan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan bagi keseimbangan ekosistem alam maupun sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, penataan lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang benar, tentu mengikuti standar *Reountable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

Prinsip utama dari RSPO adalah pengelolaan kebun yang berkelanjutan untuk menjaga kesuburan lahan, isu lingkungan dan sosial, pemberian manfaat bagi masyarakat sekitar kebun, serta pengalihan penggunaan lahan dari komunitas ke perusahaan. Dan salah satu prinsip RSPO adalah tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.

Inti dari RSPO adalah, pelaku usaha dituntut untuk transparan dalam membuka lahan perkebunan kelapa sawit tanpa merusak lingkungan hidup.

Misalnya, membuka lading di atas lahan peruntukan bagi hutan lindung atau resapan air. Hal ini jelas dilarang dalam aturan RSPO. Jika aturan itu dilanggar, maka produk CPO yang dihasilkan sulit diterima di negara tujuan ekspor yang meminta persyaratan RSPO.

Ada delapan prinsip RSPO, yakni:

1. Komitmen terhadap transparansi.
2. Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi.
4. Penggunaan praktik terbaik yang tepat oleh perkebunan dan pabrik.
5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.
6. Bertanggung jawab atas karyawan, individu dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik.
7. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab.
8. Komitmen terhadap perbaikan terus – menerus pada wilayah – wilayah utama aktivitas.

Ketaatan pada prinsip – prinsip RSPO tersebut menjadi kata kunci bagi keberhasilan pembangunan perkebunan kelapa sawit ke depan. Dan PTPN XIII selalu memegang teguh aturan yang sudah ditetapkan dalam RSPO itu. Bahkan, PTPN XIII sangat berhati – hati sekali dalam hal lingkungan hidup, terutama menyangkut penataan lahan. Berbagai problem

lingkungan dan sosial muncul, salah satunya disebabkan ketidaktaatan pengusaha terhadap aturan penataan lahan. Maka dari itu, PTPN XIII sejak awal sebelum dilakukan pembukaan lahan atau informasi lahan untuk perkebunan, sudah menginventarisir peruntukkan lahan yang akan dibuka perkebunan.

e. Program *Goes to Green*

Sesungguhnya dari berbagai program bina lingkungan yang dilakukan PTPN XIII, yang terpenting adalah revolusi perilaku, maksudnya setiap sikap individu yang ada di lingkungan PTPN XIII menyadari pentingnya berperilaku *green*. Artinya bukan semata simbol dan sekedar mengejar kegiatan yang diwajibkan lantaran adanya program Bina Lingkungan tersebut. Bila perilaku *green* ini dilakukan setiap orang, akan berdampak pada setiap kebijakan perusahaan yang selalu memperhatikan aspek lingkungan dan berpikir jangka panjang ke depan.

Isu perubahan iklim saat ini menjadi topik pembicaraan di kalangan pemerhati lingkungan dengan perilaku bisnis. Bagi PTPN XIII, bagaimana mensikapi perubahan iklim tersebut, itulah yang terpenting, bukan memperdebatkan persoalan seputar perubahan iklim itu. Sikap PTPN XIII adalah berperilaku *green* dalam segala aspek. Bahkan untuk menjawab masalah tersebut sudah menjadi agenda penting di bagian CSR perusahaan.

Selama ini, perkebunan kelapa sawit sering dituding sebagai salah satu penyumbang pemanasan global karena menambah emisi gas rumah kaca sebagai hasil samping pengolahan pabrik. Selain pembukaan lahan skala besar yang dinilai merusak hutan. Namun, dengan perilaku *green* tersebut, hal itu terbantahkan. Bahkan dengan *green manufactur* juga sudah memperhatikan dampak tersebut, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi emisi gas. Penetapan *green manufactur* ini bisa terlaksana apabila pengambil kebijakan adalah pemimin yang berjiwa *green*. Dan, *green manufactur* ini juga hemat biaya, artinya dalam pandangan bisnispun menguntungkan. Tentu praktik *green* ini dilakukan secara bertahap. Pengurangan konsumsi energi yang berasal dari minyak bumi dapat dilakukan secara perlahan sambil mengembangkan penggunaan energi alternatif yang *renewable*. Begitu juga pemanfaatan produk daur ulang bisa dilakukan secara bertahap. Intinya, perusahaan harus mampu memprediksi dampak proses *greening* dan menghubungkan dengan proses produksi.

f. Program *Survey* Lokasi

Ketika perkebunan PTPN XIII diperkenalkan ke masyarakat, pendekatan – pendekatan budaya dan etika lokal dilakukan. Salah satu contoh, ketika perusahaan akan membuka lahan baru, di sana dilakukan survey. Jika ditemukan kawasan bernilai konservasi tinggi *High Conservation Value Forest* (HCVF), maka nilai – nilai yang ada dalam kawasan hutan tersebut

tetap dipertahankan. HCVF tidak saja melindungi keanekaragaman hayati, tapi yang tak kalah penting di sini adalah kawasan yang memiliki identitas budaya tradisional masyarakat lokal. Misalnya, jika ditemukan kawasan tembawang (istilah masyarakat lokal Kalimantan untuk kawasan yang dianggap bernilai budaya tinggi), maka kawasan tersebut tetap terpelihara dan dijaga. Demikian juga dengan nilai – nilai budaya lokal lainnya. Penghargaan terhadap etika dan budaya lokal itu menjadi penting, karena kehadiran perusahaan bukan saja sekedar mencari keuntungan, tetapi bagaimana perusahaan bisa tetap tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

g. Program *One Man One Tree*

Dalam program penghijauan yang dicanangkan pemerintah, yaitu Program *One Man One Tree*, PTPN XIII ikut ambil bagian dengan berbagai aksi nyata. Hal ini sebagai salah satu upaya PTPN XIII untuk menangani isu yang mereka hadapi. Perusahaan ingin memberitahuka kepada khalayak bahwa PTPN XIII adalah perusahaan yang peduli pada kelestarian lingkungan bukan sebaliknya. Pada *event* ini, PTPN XIII melakukan penanaman bibit pohon Gaharu sebanyak 13.300 bibit (2009) di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Selain itu, PTPN XIII juga aktif mendukung program pemerintah dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang dicanangkan oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono yang telah digalakkan oleh pemerintahan sebelumnya yaitu penanaman pohon Trembesi. Wujud keterlibatan tersebut berupa pembagian bibit pohon Trembesi ke semua wilayah di Distrik Kalbar I dan Distrik Kalbar II (Agustus 2009). Berdasarkan penelitian Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, satu batang pohon Trembesi tersebut dapat menyerap 28 ton karbondioksida (CO₂) setiap tahun. Pohon ini dipercaya mampu memberikan kontribusi dalam menanggulangi pencemaran udara dan ancaman pemanasan global.

h. Program Penghijauan

PTPN XIII ikut berpartisipasi dalam program penghijauan di Kota Pontianak, yang digelar oleh Pontianak Post bersama Pemerintah Kota Pontianak dengan memberikan bantuan bibit. Untuk penghijauan Gunung Wanarasakti dan sekitarnya, PTPN XIII bekerja sama dengan TNI AD Batalyon 643 Wanara Sakti, dengan memberikan bantuan 2000 bibit pohon Mahoni. Selain program tersebut, PTPN XIII juga bekerja sama dengan Polda Kalbar, yaitu memberikan bantuan 1.000 bibit dalam rangka penanaman pohon penghijauan dalam HUT Polda Kalbar.

PTPN XIII juga bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura Pontianak, melakukan rehabilitasi hutan bakau. Program penanaman 1.000 pohon bakau yang dipusatkan di Desa Sepok Laut, Kecamatan Telok Pakedai, Kabupaten Kubu Raya. Beberapa lokasi memang terjadi abrasi pantai yang disebabkan

ombak laut. Maka dengan adanya penanaman pohon bakau ini diharapkan menjadi penyangga yang dapat mencegah terjadinya abrasi lebih luas. Selain itu, tanaman bakau juga dapat menjadi tempat berkembangbiaknya beberapa jenis udang dan ikan. Biasanya, lokasi ini menjadi tempat masyarakat memancing sebagai mata pencarian penduduk setempat. Program penghijauan yang dilakukan PTPN XIII ini tidak hanya untuk mencegah abrasi, tetapi juga membangun ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, PTPN XIII juga menunjukkan kepeduliannya terhadap program penghijauan ini dengan menanamkan Sengon sebanyak 10 ribu bibit di lahan seluas 10 hektar di Dusun Rasau Karya, Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Program sengonisasi ini akan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat dan lingkungan karena pohon Sengon merupakan pohon yang serba guna. Daun Sengon mampu menyerap nitrogen dan karbondioksida dari udara bebas dan merupakan sumber pakan ternak yang sangat baik, akarnya berfungsi untuk menyimpan zat nitrogen sehingga tanah di sekitar pohon sengon dapat ditanami dengan tanaman palawija sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani penggarapnya. Batang kayu sengon banyak diusahakan untuk berbagai keperluan dalam bentuk kayu olahan.